

Demo GPI Sampaikan 6 Tuntutan Terkait Dana Hibah, Begini Penjelasan Wabup Blitar

Sumartono - [BLITAR.HARIINI.CO.ID](https://blitar.hariini.co.id)

May 20, 2022 - 06:48



Massa Ormas GPI saat demo di Pemkab Blitar

BLITAR - Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar menggelar aksi demo terkait pemberitaan yang tidak benar (Hoak) mengenai pemberian dana hibah untuk penanganan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar senilai 229, 5 miliar dari

kementerian PUPR. Demo berlangsung di Kantor Pemkab dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (19/05/2022).

Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, segala bentuk kebijakan dari Pemkab Blitar yang salah harus dikritisi, seperti gagalnya dana hibah dari Kementerian PUPR. Gagalnya dana hibah yang melibatkan para pejabat ini harus diusut sampai tuntas, apa yang melatar belakangi hal itu sampai terjadi.

"Akibat kegagalan dana hibah yang sebenarnya diperuntukkan untuk perbaikan ruas jalan di Kabupaten Blitar itu, masyarakat merasa dibohongi. Karena mereka sangat berharap besar, ruas jalannya bisa diperbaiki," kata Jaka Prasetya

Dalam demo ini, Ormas GPI meminta 6 tuntutan diantaranya:

1. Usut tuntas dana hibah dari Kementrian PUPR untuk Kabupaten Blitar yang distempel hoax dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usut tuntas dugaan Korupsi dalam proses perencanaan penerimaan dana hibah dan suap kepada pejabat.
3. Bupati harus bertanggungjawab kepada rakyat Blitar atas kecerohohnya dalam menjalankan mekanisme kerjanya.
4. Bupati harus bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada pejabat teknis dan pihak yang terkait yang menyebabkan hoax.
5. DPRD Kabupaten Blitar sebagai fungsi kontrol jalannya pemerintahan (Eksekutif) harus memanggil Bupati dan pejabat terkait untuk dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa dana hibah hoax tersebut.
6. Kami akan melakukan segala upaya agar segala bentuk anggaran baik yang bersumber dari APBN/Kementrian, APBD Provinsi baik dalam bentuk anggaran yang bersifat reguler, DAK, Hibah dan lain-lain agar dipending/distop apabila dalam pengelolaan anggaran berbau korup demi terciptanya pemerintah Kabupaten Blitar yang bersih dari KKN.

Menanggapi aksi demo tersebut, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso saat dikonfirmasi oleh media melalui seluler menjelaskan, terkait demo tadi, sudah saya jawab di media massa dan Kementerian PUPR pusat, sudah kita jawab semuanya. Sedangkan rilis itu bukan dari media massa, itu rilis kementerian PUPR pusat dan Pemerintah Kabupaten Blitar, jadi sudah dijelaskan semuanya.

"Saat ini saya fokus menyelesaikan masalah di Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR, oleh sebab itu kenapa saya tidak bisa menemui pendemo. Karena kita sudah mengeluarkan rilis bareng dengan Kementerian PUPR pusat," katan Wabup.

"Saya rasa demo itu tidak relevan lagi, soalnya sudah gak seksi lagi dan sudah kita jawab kok di media," tandas Wabup Blitar Rahmat Santoso.

Diketahui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Bulan April Tahun 2022 terkait dana hibah yang ternyata hoax, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad

Zainal Fatah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.

Dari kesimpulan tersebut, berita tidak benar terkait pemberian dana hibah Rp. 229,5 miliar untuk pembangunan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar, Pemkab Blitar bersama Kementerian PUPR tengah menelusuri penyebab kekeliruan tersebut.
(Tn)